



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



*Empowered lives.
Resilient nations.*

Parlemen dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

**Perangkat
penilaian
mandiri**

Hak Cipta ©Inter-Parliamentary Union, 2016

Untuk penggunaan pribadi dan non-komersial, semua atau sebagian dari publikasi ini boleh direproduksi dengan syarat hak cipta dan indikasi sumber juga disalin dan tidak ada modifikasi yang dibuat. Mohon informasikan Inter-Parliamentary Union tentang penggunaan publikasi ini.

ISBN 978-92-9142-689-8

Diterjemahkan oleh:
BKSAP DPR RI

Daftar isi

Pendahuluan	2
Apa yang dimaksud dengan TPB?	4
Kerangka kerja baru untuk aksi	5
Mengadaptasi TPB ke Tataran Lokal	9
Keterlibatan parlemen dengan TPB	11
Suatu proses inklusif	11
Menilai kesiapan parlemen - mulai dari mana?	14
Kapan Anda perlu melakukan penilaian TPB mandiri?	14
Siapa yang terlibat dalam penilaian mandiri?	15
Bagaimana cara melakukan penilaian mandiri?	16
Pertanyaan penilaian mandiri	19
Pertanyaan 1: Membangun pemahaman mengenai TPB di parlemen	19
Pertanyaan 2: Menerjemahkan TPB dari tingkat global ke tingkat lokal	21
Pertanyaan 3: Mengarusutamakan TPB dalam mekanisme parlemen	23
Pertanyaan 4: Membuat undang-undang untuk mendukung TPB	26
Pertanyaan 6: Memantau pelaksanaan TPB	31
Pertanyaan 7: Partisipasi masyarakat	33
Pertanyaan 8: Memastikan bahwa dampak TPB dirasakan oleh kelompok paling rentan	35

Pendahuluan

"Kami juga mengakui peran penting dari parlemen-parlemen nasional melalui pemberlakuan undang-undang dan pembuatan anggaran dan peran mereka dalam memastikan akuntabilitas guna efektifitas pelaksanaan komitmen komitmen kita. ... "Kami para rakyat" merupakan kata-kata pembuka megah dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kitalah para rakyat yang pada hari ini mengambil jalan menuju 2030. Perjalanan kita akan melibatkan pemerintah dan juga parlemen, sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya, pemerintah daerah, masyarakat adat, masyarakat sipil, bisnis dan sektor swasta, komunitas akademisi dan ilmuwan - semua rakyat."

Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan New York, 25 September 2015

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen global penting untuk mengakhiri kemiskinan dan membawa dunia ke jalur yang berkelanjutan untuk mencapai pembangunan inklusif. Agenda ini didukung oleh para pemimpin pemerintahan pada pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan 169 target-target untuk dilaksanakan merupakan inti dari agenda ambisius ini.

TPB dimaksudkan untuk memfokuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan nasional menuju visi bersama untuk kemanusiaan. TPB dibangun berdasarkan upaya-upaya di masa lampau untuk melaksanakan agenda pengentasan kemiskinan yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Tujuan-tujuan ini memiliki aspirasi untuk mewujudkan hak asasi manusia untuk semua dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak-anak perempuan. Tujuan-tujuan ini meliputi tiga pilar pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Walaupun TPB tidak mengikat secara hukum, pemerintah-pemerintah telah memberikan komitmen moral mereka untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini dengan menggunakan kapasitas terbaik mereka dan sejalan dengan prioritas-prioritas nasional mereka.

Agenda 2030 dan TPB-nya merupakan hasil dari konsultasi dan negosiasi panjang selama beberapa tahun. IPU, UNDP, parlemen nasional dan ratusan anggota parlemen memainkan peran yang sangat aktif di sepanjang proses ini dan advokasi secara kuat untuk dimasukkannya tujuan-tujuan yang terkait dengan tata pemerintahan demokratis.

Tujuan dari perangkat penilaian mandiri ini adalah untuk membantu parlemen dan anggota parlemen untuk:

- Menilai kesiapan mereka mengenai keterlibatan dalam TPB
- Mengidentifikasi strategi-strategi, mekanisme-mekanisme dan kemitraan-kemitraan tambahan untuk mendukung pelaksanaan TPB secara lebih efektif.

Perangkat ini dirancang untuk memungkinkan anggota parlemen untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik, kesenjangan, kesempatan dan pembelajaran. Yang akan mempersiapkan anggota parlemen untuk secara efektif melembagakan agenda baru ini dan mengarusutamakan berbagai tujuan ke dalam proses legislatif. Perangkat ini bukanlah merupakan suatu resep baku. perangkat ini dirancang agar relevan bagi semua parlemen, apapun sistem politik dan tahapan pembangunan mereka.

Penilaian mandiri adalah suatu metode yang dapat digunakan oleh parlemen untuk memulai proses benchmarking internal mereka dan untuk menilai kesiapan keterlibatan mereka dalam TPB. Kesimpulan dari penilaian mandiri seharusnya memungkinkan parlemen untuk menetapkan prioritas untuk reformasi dalam rangka memperkuat responnya terhadap TPB. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan bahwa parlemen siap untuk memainkan peran penuh dalam mewujudkan Agenda 2030.

Apa yang dimaksud dengan TPB?

“Kami menyambut Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan yang datang dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan menyeluruh dari agenda baru, ini bersama-sama dengan pemajuan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan hidup. ... Kami memuji ambisi dari agenda ini untuk menjadi transformatif dan tidak meninggalkan siapapun, termasuk kelompok yang paling tertinggal dan rentan. Sesungguhnya, untuk mencapai keberhasilan pembangunan berkelanjutan harus menempatkan manusia pada pusat pembuatan keputusan. Pembangunan berkelanjutan harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dengan penghormatan penuh pada keterbatasan lingkungan. Pembangunan perlu untuk dimiliki oleh rakyat dan hal ini mengharuskan partisipasi penuh mereka. Manusia adalah individu-individu yang memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain dan terhadap lingkungan. Kita harus berinvestasi pada manusia sebagai sumber daya kita yang paling penting.

Menempatkan demokrasi untuk melayani perdamaian dan pembangunan berkelanjutan: Membangun dunia yang diinginkan oleh rakyat” Deklarasi Konferensi Ketua-Ketua Parlemen Dunia ke-4, 2 September 2015

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan 169 targetnya dirancang untuk mencakup ketiga pilar pembangunan berkelanjutan-ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. TPB memiliki kerangka kebijakan komprehensif, yang berlaku baik untuk negara maju dan negara berkembang. Tujuan-tujuan ini mencakup mulai dari pengentasan kemiskinan absolut sampai membalikkan perubahan iklim, dan dari pencapaian kesetaraan gender ke perubahan pola konsumsi dan produksi (lihat gambar). Sejumlah indikator global telah dirancang untuk membantu melacak kemajuan dalam pencapaian tujuan-tujuan ini.

Agenda 2030 menempatkan manusia pada pusat dari proses pembangunan. Agenda ini meminta pemerintah, parlemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang dan melaksanakan undang-undang dan program yang memenuhi kebutuhan rakyat, memecahkan silo kebijakan, menegakkan hak asasi manusia dan tidak meninggalkan siapapun di belakang.



Kerangka kerja baru untuk aksi

TPB bukan saja mengidentifikasi prioritas-prioritas sektor dan menetapkan target-target baru ambisius; TPB juga membawa gebrakan. Untuk pertama kalinya suatu kesepakatan internasional mengakui peran utama kelembagaan yang efektif, inklusif dan akuntabel dalam proses pembangunan. Tujuan 16, juga dikenal sebagai tujuan tata kelola pemerintahan merefleksikan pandangan IPU dan UNDP sejak lama bahwa tata kelola pemerintahan demokratis bukan merupakan tujuan itu sendiri, tetapi juga merupakan cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, pengawasan dan perwakilan penting, parlemen memiliki kepentingan langsung dalam tujuan ini (lihat kotak, halaman 6).

Tujuan 10 merupakan inovasi penting lain TPB. Tujuan 10 mengenali bahwa kesenjangan yang semakin meningkat merupakan ancaman bagi perekonomian dan jalinan sosial, dan oleh karenanya tujuan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Tujuan 5 (mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan

anak-anak perempuan) melengkapi visi SDG mengenai masyarakat yang bebas diskriminasi. Tujuan ini menekankan pada pemberdayaan dan kehidupan tanpa kekerasan. Tujuan 5 secara khusus bertepatan dengan salah satu prioritas utama IPU dan UNDP.

Pembangunan masyarakat dan perekonomian kita bergantung pada kesempatan perempuan dan laki-laki, anak-anak perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak, tanggung jawab dan kesempatan yang penuh dan setara. Kita harus mendedikasikan kembali diri kita untuk pencapaian penuh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan pada 2030¹

¹ Menempatkan demokrasi untuk melayani perdamaian dan pembangunan berkelanjutan: Membangun dunia yang diinginkan oleh orang-orang. Deklarasi Konferensi Ketua-Ketua Parlemen yang ke-4, 2 September 2015.

Tujuan 16: Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh-suatu tinjauan

Beranjak dari pembelajaran Tujuan Pembangunan Milenium, TPB memasukkan satu tujuan spesifik untuk "menguatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan".

Dua target pada tujuan ini merujuk kepada peran dari parlemen:

- Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.
- 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representasi di setiap tingkatan.

Target-target lain merujuk pada prinsip-prinsip utama tata pemerintahan demokratis seperti misalnya aturan hukum, keadilan, akses terhadap informasi dan kebebasan fundamental.

Parlemen perlu untuk terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan dari keseluruhan kerangka kerja SDG. Tetapi mereka juga perlu untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan lembaga mereka sendiri sejalan dengan target 16.6 dan 16.7. Sebagai contoh, parlemen dapat bekerja dengan badan pusat statistik negara mereka untuk mengembangkan indikator-indikator yang mencerminkan prioritas mereka sendiri dalam mendukung target 16.6 dan 16.7.

Agenda 2030 merefleksikan pergeseran fokus pemikiran pembangunan dari pemenuhan kebutuhan dasar penegakan hak asasi manusia. Deklarasi 1986 mengenai Hak untuk Pembangunan menjabarkan dengan paling jelas bahwa pendekatan berbasis hak menempatkan rakyat sebagai pusat dari proses pembangunan. Deklarasi ini menunjukkan Negara sebagai pemegang tanggung jawab utama dan mewajibkan mereka untuk berkontribusi dalam mewujudkan semua hak asasi manusia. Deklarasi mengenai Hak atas Pembangunan mendefinisikan hak-hak rakyat akan pembangunan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat terpisahkan "karena setiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi pada, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat diwujudkan sepenuhnya".²

Menerjemahkan kerangka kerja global tersebut menjadi kebijakan nasional yang dapat dilakukan memerlukan upaya bersama. Seluruh elemen

² Deklarasi mengenai Hak atas Pembangunan:
www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm

masyarakat perlu untuk mengambil bagian, dimulai dengan rakyat sendiri. Elemen utama dari Agenda 2030 adalah bahwa rakyat harus dilibatkan di semua tahapan, dari awal perancangan kebijakan sampai pelaksanaan dan pengawasan. Parlemen di tingkat nasional dan subnasional harus bekerja untuk memfasilitasi hal ini.

Melengkapi Agenda 2030

Agenda 2030 menjabarkan suatu visi global untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda ini juga dilengkapi dengan tambahan tiga kesepakatan internasional mengenai pendanaan pembangunan, perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut memberikan suatu kerangka kerja menyeluruh dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan kedepan:

- **Agenda Aksi Addis Ababa,**³ Ini adalah dokumen hasil Konferensi Internasional ke-3 mengenai Pendanaan Pembangunan (Juli 2015). Yang menyediakan suatu kerangka kerja global untuk mobilisasi sumberdaya yang diperkirakan bernilai triliunan dolar untuk mendanai pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama pembangunan, pajak internasional, perdagangan, dan serangkaian regulasi dan reformasi kelembagaan. Agenda ini sejalan dengan TPB 17 (menguatkan sarana pelaksanaan).
- **Kesepakatan Paris mengenai Perubahan Iklim,**⁴ Pemerintah-pemerintah mengadopsi kesepakatan ini pada Desember 2015. Kesepakatan ini bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri. Kenaikan yang lebih besar dapat mengakibatkan konsekuensi katastrofik dan tidak dapat diperbaiki lagi bagi perkembangan manusia. Kesepakatan ini mensyaratkan semua negara untuk mengambil langkah-langkah efektif dan dapat diverifikasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, penyebab utama pemanasan global. Kesepakatan ini juga memperluas SDG 13 (penanganan perubahan iklim).
- **Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana,**⁵ Para pemimpin memberikan dukungan terhadap kerangka ini pada Maret

³<https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda>

⁴<https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement>

⁵<https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework>

2015. Kerangka ini mencerminkan pengalaman-pengalaman yang didapatkan melalui upaya-upaya regional dan nasional untuk menangani pengurangan risiko bencana. Kerangka ini mengakui bahwa bencana adalah kemunduran bagi pembangunan, bahwa resiko harus dikurangi dan dimitigasi, dan bahwa rekonstruksi harus mengikuti prinsip membangun kembali dengan lebih baik. Kerangka kerja ini secara spesifik

Mengadaptasi TPB ke Tataran Lokal

TPB dirancang dengan kerangka luas dan menyeluruh. TPB dimaksudkan untuk membantu memfokuskan dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan nasional (termasuk yang sudah ada sebelumnya) menuju visi bersama untuk kemanusiaan. Oleh karenanya masing-masing negara perlu untuk mengidentifikasi prioritas masing-masing, dan mengadaptasi target-target dan indikator-indikator untuk memandu pelaksanaan nasionalnya.

Untuk mengadaptasi TPB masing-masing negara harus mengembangkan atau memuktahirkan rencana pembangunan nasionalnya. Tujuan-tujuan dan target-target spesifik negara harus didukung dengan indikator-indikator kemajuan yang relevan secara lokal agar dapat merekam hasil-hasil di lapangan. Warga negara harus terlibat erat dalam proses ini. Parlemen memiliki peran kunci dalam hal ini untuk memastikan bahwa TPB nasional mencerminkan kebutuhan spesifik lokal dan situasi kelompok-kelompok spesifik.

Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan TPB harus melihat secara holistik dan sinergis pada kebutuhan pembangunan manusia, yang bisa mengambil bentuk sosial ekonomi, budaya atau lingkungan hidup. Sebagai contoh, kebijakan untuk memerangi kemiskinan (TPB 1) tidak dapat secara sempit diartikan sebagai menaikkan pendapatan, walaupun hal ini penting. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan anti kemiskinan harus menangani semua dimensi permasalahan ini, seperti misalnya kurangnya pendidikan, kesehatan yang buruk dan kelaparan. Kebijakan-kebijakan komprehensif seperti ini juga perlu untuk disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang paling rentan dan marginal. Kelompok-kelompok ini mungkin tertinggal dari rata-rata nasional pada ukuran-ukuran seperti misalnya PDB per kapita, usia harapan

27(i): “untuk mendorong anggota-anggota parlemen untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana dengan mengembangkan undang-undang baru atau amandemen undang-undang terkait dan menetapkan alokasi anggaran”;

48 (h): “untuk terus mendukung dan advokasi pengurangan risiko bencana dan memperkuat kerangka kerja hukum nasional”.

hidup, capaian pendidikan dan partisipasi politik. Pendekatan holistik dan sinergis merupakan inti dari prinsip tidak meninggalkan siapapun yang mendasari keseluruhan Agenda 2030.

Agenda 2030 meliputi prinsip-prinsip pemandu dan tonggak-tonggak untuk mengkaji kemajuan secara berkala. Kemajuan global dalam TPB akan dinilai berdasarkan serangkaian indikator-indikator yang telah disepakati.⁶ Dipahami bahwa Negara-negara dapat mengadopsi indikator-indikator yang sesuai untuk konteks lokal untuk melacak kemajuan nasional mereka.

Pentingnya data

Untuk memastikan bahwa undang-undang, anggaran dan program secara efektif menargetkan mereka yang paling memerlukan, anggota parlemen harus bisa mengakses data terpilah mengenai serangkaian isu-isu kunci. Biasanya hal ini dilakukan melalui badan pusat statistik. Parlemen dapat juga menggunakan kewenangan mereka untuk membuat anggaran untuk memastikan bahwa badan pusat statistik mendapatkan anggaran yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data secara efektif. Anggota parlemen juga dapat mendukung upaya-upaya ahli statistik untuk mengumpulkan dan memvalidasi data melalui pemahaman mereka sendiri mengenai demografi dan kebutuhan konstituen mereka.

⁶ Lihat website indikator-indikator SDG di Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa di <http://unstats.un.org/sdgs/>

Keterlibatan parlemen dengan TPB

“Sebagai anggota parlemen, kami harus mendukung upaya-upaya untuk mencapai tujuan-tujuan baru dengan cara-cara yang menghormati karakteristik spesifik masing-masing negara. Tanggung jawab kami jelas: untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tujuan-tujuan yang telah mereka sepakati, dan untuk memastikan bahwa undang-undang yang mendukung disahkan dan anggaran-anggaran diadopsi... Kami akan berusaha mengatasi mentalitas silo di dalam parlemen kami sendiri dan administrasi nasional kami untuk mencerminkan sifat lintas sektor dari tujuan-tujuan ini. Dalam hal ini kami akan melakukan yang terbaik untuk melembagakan tujuan-tujuan ini di setiap parlemen, dengan waktu yang memadai untuk diskusi dan pemantauan.”

Deklarasi Hanoi - Tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan - mengubah kata-kata menjadi tindakan, sidang IPU ke-132, Hanoi, 1 April 2015.

TPB adalah kesempatan bagi anggota-anggota parlemen untuk menunjukkan komitmen mereka untuk memperbaiki kehidupan manusia dan kesehatan planet bumi di mana semua keberadaan manusia bergantung. Lebih mendesak lagi, TPB adalah kerangka kerja yang kokoh di mana parlemen dapat mendasarkan rencana strategis mereka dan pelaksanaan kerja pengawasan dan akuntabilitas mereka.

Suatu proses inklusif

Di banyak negara, kelompok kerja SDG nasional atau badan lain yang sejenis akan dibentuk untuk mengkoordinasikan dan memandu pelaksanaan SDG. Perwakilan parlemen harus dilibatkan dalam lembaga tingkat tinggi ini sehingga mereka dapat mengkontribusikan pandangan konstituen mereka dan memberikan dukungan kelembagaan. Parlemen harus menuntut agar pemerintah membuat atau memutakhirkan rencana TPB nasional (atau rencana sektoral terkait lainnya). Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dan rencana rencana nasional akan dikembangkan atau dikaji sehingga kontribusi mereka dalam pencapaian TPB menjadi lebih efektif. Parlemen harus dapat berkontribusi terhadap rencana ini melalui proses konsultasi publik yang luas. Parlemen harus secara formal mengadopsi rencana TPB nasional setelah mengkaji secara komprehensif dan diskusi formal. Terakhir,

Parlemen harus meminta pemerintah untuk menyampaikan laporan kemajuan secara berkala mengenai pelaksanaan rencana nasional.

Partisipasi parlemen dalam pemantauan kemajuan global

Pemerintah-pemerintah nasional duduk di kursi pengemudi dalam pelaksanaan TPB. Tetapi proses ini juga didukung secara internasional melalui mekanisme pertukaran informasi dan pemantauan. Salah satu yang paling penting adalah Forum Politik Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap bulan Juli, pemimpin-pemimpin nasional berkumpul pada forum ini untuk membahas kemajuan dan mengkalibrasi ulang upaya-upaya global. Sejumlah negara melakukan review nasional sukarela setiap tahunnya. Review harus merupakan proses partisipatif yang terbuka untuk semua pemangku kepentingan, termasuk parlemen. Untuk memfasilitasi keterlibatan parlemen, IPU menyelenggarakan sesi khusus Komisi Urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sidang IPU pertama setiap tahunnya.

Peran utama parlemen dalam pembuatan undang-undang, penetapan anggaran, pengawasan dan mewakili kepentingan konstituen, sangat penting dalam pelaksanaan penuh TPB.

- **Pembuatan undang-undang**, Untuk melaksanakan TPB, penting untuk memastikan adanya lingkungan yang pro kaum miskin, sensitif gender, berdasarkan hak asasi manusia. Memastikan rasa kepemilikan nasional terhadap TPB juga memerlukan undang-undang yang mendorong akuntabilitas publik, pembuatan keputusan partisipatif dan inklusif. Dalam hal ini, anggota-anggota parlemen harus mengkaji usulan undang-undang dari pemerintah untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap pencapaian rencana TPB nasional dan Agenda 2030 secara lebih luas.



- **Penetapan anggaran**, Keberhasilan pelaksanaan TPB berarti memaksimalkan semua sumber daya domestik yang tersedia untuk mencapai hasil terbaik. Pada proses pengesahan anggaran, parlemen harus mengetahui mengenai bagaimana anggaran pemerintah dialokasikan untuk TPB yang ditetapkan secara nasional, termasuk apakah pendanaan yang memadai menjangkau kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan. Di sisi penerimaan, parlemen harus memastikan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya yang ditetapkan di keseluruhan proses anggaran sejalan dengan rencana TPB nasional. Pengawasan parlemen atas pengeluaran atau belanja juga sangat penting. Ini adalah kesempatan bagi parlemen untuk menganalisis keefektifan belanja pemerintah terhadap capaian TPB.
- **Pengawasan**, Pemantauan hasil merupakan elemen penting dari pelaksanaan TPB. Parlemen harus memastikan bahwa pelaksanaannya berada di jalur yang tepat dan dapat disesuaikan ulang berdasarkan bukti-bukti yang ada dan umpan balik dari masyarakat. Mekanisme pengawasan parlemen seperti misalnya Waktu Tanya-Jawab, pertanyaan tertulis ke pemerintah, dan rapat dengar pendapat komisi bisa menjadi sangat efektif dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan atau menilai kemajuan. Alat kelengkapan parlemen harus memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat pemerintah untuk memberikan informasi mengenai dampak kebijakan dan program pemerintah. Alat kelengkapan juga harus bisa mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk mengumpulkan pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan SDG. Pengetahuan yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perencanaan pemerintah dan mekanisme pelaksanaan pemerintah melalui kelompok kerja SDG nasional atau badan sejenis lainnya di mana parlemen juga mengambil bagian.
- **Perwakilan**, untuk memastikan rasa kepemilikan nasional yang bermakna terhadap TPB semua warga negara dan pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dan prioritas. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen memiliki kewajiban untuk menjangkau konstituen mereka selama masa jabatan mereka bukan hanya menjelang pemilu saja. Dengan berdiskusi langsung dengan rakyat, anggota parlemen dapat mengidentifikasi kesenjangan dan kelemahan dalam pelaksanaan SDG yang mungkin tidak ditangkap dalam laporan pemerintah secara umum atau dalam statistik nasional. Anggota parlemen harus mengetahui permasalahan konstituen secara lebih luas: berkonsultasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga akademis, sektor swasta, dan lain-lain dapat membantu mengidentifikasi permasalahan permasalahan ini.

Menilai kesiapan parlemen - mulai dari mana?

Penilaian mandiri berdasarkan definisinya adalah suatu kegiatan sukarela. Penilaian ini akan berjalan baik apabila parlemen, terutama pimpinan tertingginya, melihat kegiatan ini sebagai suatu cara untuk memperkuat kelembagaan ini. Penilaian mandiri, berbeda dengan evaluasi faktor eksternal, turut memastikan bahwa parlemen memegang kendali penuh atas temuan-temuan yang didapatkan. Penilaian mandiri bukan dan tidak seharusnya digunakan dengan tujuan menempatkan parlemen-parlemen dalam urutan peringkat. Sebaliknya, penilaian mandiri memberikan informasi yang berguna untuk membantu meningkatkan kinerja fungsi-fungsi utama parlemen termasuk legislasi, perwakilan dan pengawasan. Tujuannya adalah untuk menyepakati visi bersama terkait situasi pada saat ini, prioritas tindakan di masa yang akan datang, dan rekomendasi tentang langkah-langkah terbaik untuk mencapai kemajuan.

Kapan Anda perlu melakukan penilaian TPB mandiri?

TPB mulai berlaku pada 1 Januari 2016 dan pelaksanaannya sudah berlangsung. Oleh karenanya, akan bermanfaat untuk menilai proses kelembagaan Anda dan kapasitasnya dalam melaksanakan TPB sesegera mungkin. Hal ini akan memastikan bahwa parlemen berada di barisan terdepan dalam upaya pelaksanaan TPB.

Agenda 2030 dan kerangka kerja TPB harus diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat yaitu 15 tahun. Penilaian mandiri berkala terkait kapasitas dan kebutuhan akan memungkinkan anggota parlemen untuk memastikan bahwa parlemen mereka secara aktif berkontribusi terhadap proses pelaksanaan TPB secara terus-menerus. Penilaian mandiri yang pertama kali dilakukan sesegera mungkin akan menyajikan informasi dasar. Penilaian mandiri selanjutnya dapat dilakukan setiap tiga sampai

lima tahun sekali. Penilaian ini dapat berfokus pada apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dilakukan, serta praktik-praktik baik dan pembelajaran-pembelajaran.

Siapa yang terlibat dalam penilaian mandiri?

Melakukan penilaian mandiri membutuhkan kerja sama berbagai pelaku untuk mendiskusikan kesiapan dan kapasitas. Anggota parlemen adalah pemangku kepentingan dan penilai utama kesiapan mereka.

Pengalaman menunjukkan bahwa penilaian mandiri parlemen memberikan hasil optimalnya ketika dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh pimpinan parlemen, pimpinan alat kelengkapan atau anggota parlemen senior lainnya. Kepemimpinan tingkat tinggi dari proses dan pelibatan anggota parlemen lintas bagian akan meningkatkan peluang diterimanya hasil temuan oleh keseluruhan parlemen.

Penilaian Mandiri bukanlah suatu kegiatan yang sekadar mengisi daftar periksa saja. Kegiatan ini secara khusus dimaksudkan untuk menyatukan anggota-anggota parlemen dengan pandangan dan kompetensi yang berbeda sehingga dapat merefleksikan kesiapan parlemen untuk terlibat dalam TPB. Menyatukan kelompok dengan latar belakang yang berbeda meningkatkan legitimasi proses penilaian mandiri sebagai suatu kegiatan lembaga. Kelompok ini idealnya mewakili keberagaman parlemen nasional dan keberagaman yang ada di satu negara. Kelompok ini harus meliputi anggota parlemen laki-laki dan perempuan dari pemerintah dan oposisi, serta anggota parlemen dari kelompok-kelompok yang kurang terwakili, seperti anggota parlemen muda minoritas dan orang-orang dari berbagai wilayah negara. Apabila kelompok ini meliputi beragam pandangan dari parlemen, termasuk staf parlemen, maka ia akan mampu merefleksikan proses dan kesiapan internal, yang penting sifatnya bagi pencapaian hasil yang membangun.

Parlemen juga dapat mengundang pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam penilaian mandiri ini, seperti masyarakat sipil atau kelompok perempuan, perwakilan kaum muda, serikat pekerja, akademisi atau pers. Kalangan luar ini dapat memberikan data dan masukan yang berbeda dari konstituennya masing-masing, sehingga

dapat memberikan lebih banyak informasi dan memperkaya proses ini. Setiap parlemen akan memutuskan sendiri apakah mereka mau melibatkan peserta eksternal atau tidak dan metode berinteraksi dengan mereka.

Bagaimana cara melakukan penilaian mandiri?

TPB mencakup berbagai persoalan pembangunan dan meliputi berbagai pendekatan pelaksanaan yang kompleks. Oleh karenanya, kegiatan penilaian mandiri sangat disarankan agar didahului dengan seminar tentang informasi TPB. Seminar ini berguna untuk menyosialisasikan kepada anggota parlemen berbagai elemen kunci Agenda 2030, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan kerangka kerja yang menyertainya. Idealnya, seminar dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah (misalnya melalui badan pelaksana atau panja TPB nasional, jika ada). Hal ini akan memungkinkan anggota parlemen untuk mulai membangun kemitraan, termasuk dengan pejabat pemerintah yang nantinya akan berkoordinasi dengan mereka dalam pelaksanaan TPB ke depan.

Seminar informasi TPB juga dapat dimanfaatkan untuk meresmikan dan memulai kegiatan penilaian mandiri. Seminar ini dapat berfungsi untuk memperkenalkan anggota parlemen kepada proses penilaian lalu memulai periode refleksi yang penting terhadap keberhasilan penilaian mandiri. Seminar juga merupakan kesempatan yang baik untuk mengetahui anggota parlemen yang mungkin tertarik untuk menyelenggarakan penilaian mandiri atau berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Apabila parlemen terdiri dari dua majelis-bikameral, kedua majelis dapat menjalankan penilaian mandiri, baik secara terpisah ataupun bersama. Pilihan ini bergantung pada tingkat kerjasama dan kolaborasi diantara keduanya, serta tingkat pembagian sumber daya yang dimilikinya. Penilaian mandiri bersama akan memungkinkan parlemen bikameral untuk mengidentifikasi strategi bersama dan tindakan-tindakan yang saling melengkapi. Namun, di beberapa negara, salah satu atau kedua majelis parlemen tidak terdiri dari atau mewakili partai politik (seperti misalnya yang mewakili pemuka adat). Oleh karenanya, pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk memastikan keterwakilan yang inklusif dari berbagai perspektif masyarakat.

Preparing for a parliamentary self-assessment exercise

Dukungan dari Pimpinan

Apakah pimpinan dan atau badan musyawarah telah mendukung pelaksanaan penilaian mandiri?

Siapa yang akan memulai dan menyelenggarakan kegiatan ini?

Apakah ada badan musyawarah lintas fraksi yang dapat memberikan panduan strategis?

Organisasi / Logistik

Dalam parlemen non-partisan, apakah terdapat jajaran pimpinan inklusif yang dapat memberikan panduan strategis?

Apakah terdapat kelompok di sekretariat yang dapat menyediakan logistik?

Apakah terdapat sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penilaian mandiri?

Apa saja yang menjadi tujuan dari kegiatan ini?

Tujuan

Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan adanya kesepahaman di antara anggota parlemen dan peserta lainnya tentang manfaat dan tujuan dari kegiatan penilaian mandiri ini?

Siapa yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini?

Partisipasi

Bagaimana metode pemilihan anggota parlemen yang akan berpartisipasi? Apakah semua anggota parlemen yang tertarik akan diundang, atau hanya sebagian saja untuk mewakili kelompok?

Apakah akan ada partisipasi dari non-anggota parlemen, baik sebagai kontributor aktif ataupun sebagai tenaga ahli?

Bagaimana metode pemilihan orang-orang dari kalangan luar ini?

<p>Fasilitator</p>	<p>Bagaimana kegiatan ini akan difasilitasi? Apakah akan ada seorang fasilitator untuk seluruh rangkaian kegiatan?</p> <p>Bagaimana fasilitator akan dipilih dan disepakati? Dukungan seperti apa yang akan mereka perlukan?</p> <p>Apakah perlu ada pendanaan untuk membayar honor fasilitator, atau apakah ada organisasi mitra yang dapat memberikan kontribusi dalam bentuk fasilitator yang berkualitas baik?</p>
<p>Sumber data</p>	<p>Data apa yang tersedia sebagai informasi dalam kegiatan penilaian mandiri? Apakah terdapat laporan pemerintah yang dapat di gunakan? Apakah terdapat laporan parlemen termasuk dari komisi terkait? Apakah terdapat laporan terkait dari badan-badan regional atau internasional (termasuk badan-badan konvensi hak asasi manusia)?</p> <p>Siapa yang akan bertanggung jawab atas pengumpulan dan pemilahan informasi yang dapat digunakan oleh anggota parlemen?</p>
<p>Hasil penilaian</p>	<p>Apa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini? Laporan? Rencana aksi untuk parlemen? Keduanya? Jaringan baru/lebih kuat dari pemangku kepentingan yang berfokus pada pelaksanaan TPB (contoh: anggota parlemen, LSM lembaga-lembaga independen)? Identifikasi pemangku kepentingan utama? Pengembangan kemitraan?</p> <p>Siapa yang akan bertanggung jawab untuk membuat hasil ini (misalnya: sekretariat parlemen, alat kelengkapan)?</p>
<p>Tindak Lanjut</p>	<p>Tindak lanjut apa yang diharapkan? Kapan?</p> <p>Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut?</p> <p>Bagaimana tindak lanjut akan dipantau?</p>

Pertanyaan penilaian mandiri

Proses penilaian mandiri harus dimulai dengan serangkaian pertanyaan yang dapat digunakan untuk secara sistematis mempertimbangkan berbagai persoalan yang perlu didiskusikan. Proses ini cenderung membantu anggota parlemen untuk secara efektif merefleksikan kesiapan dan mengidentifikasi prioritas-prioritas mereka untuk tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tetapi tidak ada satu solusi tunggal atau satu rangkaian pertanyaan yang sesuai untuk konteks semua negara.

Pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan di bawah ini hanyalah indikasi. Pertanyaan-pertanyaan ini didasarkan pada kegiatan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh parlemen. Pertanyaan-pertanyaan di bagian A pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi faktual dan memberikan latar belakang untuk diskusi di bagian B, di mana pertanyaan-pertanyaannya bersifat lebih subjektif dan seharusnya membuat peserta dapat mengidentifikasi prioritas untuk tindakan-tindakan lebih lanjut.

Parlemen mungkin ingin menyesuaikan beberapa pertanyaan di bawah ini dengan konteks negara mereka sendiri. Mereka tidak perlu mendiskusikan semua pertanyaan yang diusulkan dan bisa juga menambahkan pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri.

Pertanyaan 1: Membangun pemahaman mengenai TPB di parlemen.

Setiap parlemen harus mempertimbangkan untuk menyelenggarakan seminar penyebaran informasi dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas. Hal ini akan memastikan bahwa semua anggota parlemen memiliki pemahaman mendasar yang sama mengenai Agenda 2030, TPB dan target-target yang mendukungnya. Untuk jangka panjang, beberapa parlemen merasakan manfaat ketika mengembangkan kemitraan yang erat dengan berbagai kementerian dan badan keahlian (seperti misalnya organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan internasional atau akademisi). Kemitraan-kemitraan ini memungkinkan anggota parlemen untuk mengakses masukan teknis, sumber informasi yang lebih luas dan kesempatan pelatihan.

Bagian A: mengidentifikasi dasar perbandingan (*baseline*) anda

- Apakah informasi mengenai TPB dimasukkan ke dalam bahan pengarah dan program orientasi untuk anggota parlemen baru setelah mereka terpilih pada pemilu?
- Apakah anggota parlemen menerima informasi terbaru mengenai persoalan-persoalan pelaksanaan TPB di tingkat nasional dan internasional? Seberapa sistemik-nya pemberian informasi ini?
- Apakah anggota parlemen telah berpartisipasi dalam acara-acara internasional dan regional mengenai TPB yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman?

Dalam 12 bulan terakhir:

- Apakah anggota parlemen mendapatkan pelatihan mengenai TPB? Apabila iya, berapa kali pelatihan ini dilaksanakan dan untuk berapa banyak anggota parlemen (laki-laki dan perempuan)?
- Apakah pelatihan atau kegiatan peningkatan kesadaran akan TPB untuk para staf parlemen telah dilaksanakan? Apabila iya, berapa kali dan untuk berapa orang staf (laki-laki dan perempuan)? Dari bagian mana staf ini berasal?

Bagian B: merefleksikan dampak dari upaya Anda.

- Apakah anggota parlemen memiliki akses ke informasi nasional dan internasional mengenai pelaksanaan TPB?
 - Seberapa efektif perpustakaan parlemen dalam memberikan informasi dan analisis kepada anggota parlemen mengenai persoalan TPB?
 - Apakah anggota parlemen terbuka untuk menerima informasi dari organisasi masyarakat sipil, lembaga think tank, lembaga akademik, mitra pembangunan dan pakar-pakar TPB lainnya?
 - Apakah parlemen telah menghubungi focal point nasional untuk pembangunan berkelanjutan (contoh: Badan pembangunan berkelanjutan nasional) atau badan pemerintah lainnya untuk mendapatkan informasi atau pelatihan bagi anggota parlemen mengenai TPB?
- Apakah terdapat mekanisme atau struktur yang memungkinkan anggota parlemen untuk mendiskusikan persoalan-persoalan TPB (contoh: kelompok kerja, kaukus atau gugus tugas mengenai TPB)? Seberapa efektif mekanisme atau struktur ini?

- Apakah pernah dilakukan evaluasi mengenai kekuatan dan kelemahan dari upaya-upaya pelaksanaan MDGs (atau program pengentasan kemiskinan secara umum) yang pernah dilakukan sebelumnya?
 - Apakah pernah dilakukan evaluasi mengenai mekanisme parlemen yang digunakan untuk berpartisipasi dalam MDGs dan seberapa efektif mekanisme ini?

Pertanyaan 2: Menerjemahkan TPB dari tingkat global ke tingkat lokal

Agenda 2030 dan TPB telah diakui sebagai suatu kerangka kerja global. Tetapi pelaksanaannya perlu untuk disesuaikan dengan prioritas-prioritas nasional, dan didasarkan pada rencana dan upaya nasional yang sudah ada sebelumnya. Tidak semua TPB akan menjadi sama pentingnya untuk setiap negara atau daerah. Terdapat 8-10 “target” yang mendukung masing-masing TPB. Target-target ini memberikan lebih banyak informasi detail mengenai persoalan-persoalan utama yang harus ditangani untuk mencapai tujuan ini secara nasional. Demikian juga, target-target ini mungkin tidak perlu diberikan prioritas pelaksanaan yang sama. Untuk Menerjemahkan TPB ke tataran lokal, badan perencanaan nasional perlu untuk mengkaji dan merevisi rencana pembangunan nasional dan sektoral. Negara mungkin juga perlu mengembangkan rencana pelaksanaan TPB baru. Anggota parlemen harus dilibatkan dalam proses ini termasuk untuk memasukkan prioritas konstituen mereka sebagaimana yang mereka ketahui.

Bagian A: mengidentifikasi dasar perbandingan (*baseline*) Anda

- Apakah terdapat rencana nasional untuk pelaksanaan TPB? Apabila iya, apakah terdapat keterkaitan antara rencana tersebut dengan rencana sektoral yang sudah ada sebelumnya (iklim, pendidikan kesehatan, dan lain-lain)?
- Apakah parlemen secara formal memberikan dukungan kepada rencana nasional ini?
- Apakah parlemen telah menyelenggarakan sidang (di paripurna atau di alat-alat kelengkapan yang terkait) mengenai pelaksanaan TPB di negara anda untuk mendiskusikan prioritas-prioritas nasional?

Dalam 12 bulan terakhir, apakah pemerintah telah:

- menyampaikan laporan ke parlemen mengenai pelaksanaan TPB?
- membuat pernyataan tingkat kementerian kepada parlemen mengenai pelaksanaan TPB?
- memberikan data mengenai kemajuan pencapaian target dan indikator TPB? Apakah data tersebut dipilah berdasarkan jenis kelamin, usia, sebaran geografis, dan karakteristik-karakteristik terkait lainnya?

Bagian B: merefleksikan dampak dari upaya-upaya Anda

- **Seberapa jauh parlemen telah dilibatkan dalam pembuatan rencana nasional untuk TPB?**
 - Apabila tidak terdapat rencana SDG nasional, apakah terdapat proses perencanaan TPB atau sektoral untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang, dimana parlemen harus dilibatkan?
 - Dukungan dan informasi apa yang diperlukan oleh anggota parlemen untuk dapat terlibat secara efektif dalam proses perencanaan ini?
- **Seberapa efektifkah kerjasama antara parlemen dan pemerintah dalam TPB?**
 - Apakah terdapat badan pemerintah (kementerian, gugus tugas, kelompok kerja, unit atau lainnya) yang bertanggung jawab atas koordinasi atau perencanaan TPB, yang bekerja bersama dengan parlemen?
 - Seberapa jauh pemerintah melibatkan parlemen dalam pelaksanaan TPB?
 - Apakah terdapat contoh-contoh di masa lalu di mana parlemen bekerja bersama dengan gugus tugas pemerintah dalam isu pembangunan berkelanjutan, yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi parlemen?

Pertanyaan 3: Mengarusutamakan TPB dalam mekanisme parlemen

TPB adalah kerangka kerja pembangunan berkelanjutan multisektoral, yang komprehensif. Cakupan dari agenda 2030, yang ingin diwujudkan oleh TPB, memerlukan anggota parlemen untuk mengambil tindakan dalam berbagai persoalan kebijakan lintas sektor dan untuk mengatasi silo kelembagaan (masing-masing lembaga bekerja sendiri-sendiri). Silo seperti ini seringkali terjadi di dalam pemerintahan dan sering juga terjadi dalam pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Masing-masing alat kelengkapan seringkali diberikan tanggung jawab tunggal untuk mengawasi isu TPB, dan bukan mengarusutamakan pelaksanaan TPB dan pengawasannya dalam keseluruhan proses dan mekanisme parlemen. Akan sangat bermanfaat apabila kita mengkaji secara sistematis mekanisme yang ada di parlemen pada saat ini. Hal ini memungkinkan anggota parlemen untuk mengidentifikasi apakah mekanisme-mekanisme tersebut dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan TPB, dan kemudian mempertimbangkan apakah ada manfaatnya apabila membuat proses dan mekanisme baru⁷.

Bagian A: mengidentifikasi dasar perbandingan (*baseline*) Anda

- Apakah parlemen telah secara formal memberikan dukungan pada Agenda 2030 dan TPB (mungkin melalui mosi atau resolusi)?⁸
- Apakah parlemen memiliki rencana kelembagaan yang secara memadai mengidentifikasi prioritas-prioritasnya terkait dalam pemberian dukungan pada pelaksanaan dan pengawasan TPB?

⁷ Contoh mekanisme-mekanisme seperti ini termasuk membentuk (sub-)alat kelengkapan TPB; mengarusutamakan TPB di semua alat kelengkapan, membentuk kelompok kerja yang terdiri dari semua pimpinan alat kelengkapan untuk memastikan isu TPB diarusutamakan di dalam dan lintas alat kelengkapan, menciptakan mekanisme yang lebih informal untuk memfasilitasi pertukaran informasi berkala mengenai pelaksanaan TPB antar alat kelengkapan, dan melakukan dengar pendapat dengan para ahli.

⁸ Contoh resolusi, yang diadopsi oleh Komite Eksekutif IPU pada Sidang IPU ke-133, bisa diunduh di http://www.ipu.org/un-e/model_SDG.pdf

- Apakah parlemen telah secara jelas menetapkan yang bertanggung jawab untuk TPB di dalam struktur parlemennya sendiri?
 - Apakah parlemen telah memberikan tanggung jawab kepada badan atau struktur parlemen yang telah ada untuk mengkoordinasikan kerja-kerja yang terkait dengan TPB? Apabila iya, badan atau struktur mana?
 - Apakah TPB telah dimasukkan sebagai salah satu mandat formal untuk salah satu atau lebih alat kelengkapan? Apabila iya, yang mana?
 - Apakah parlemen telah membentuk suatu alat kelengkapan khusus untuk TPB?
 - Apakah terdapat mekanisme informal lintas partai yang berfokus pada TPB (contoh: kaukus, kelompok kepentingan)?

Dalam 12 bulan terakhir:

- Berapa banyak rapat paripurna yang telah diselenggarakan oleh parlemen mengenai TPB?
- Alat kelengkapan mana yang telah membahas mengenai TPB?
- Berapa banyak laporan alat kelengkapan mengenai TPB yang telah dipublikasikan?

Bagian B: merefleksikan dampak dari upaya-upaya Anda

- Apakah alat-alat kelengkapan dari masing-masing parlemen telah mendiskusikan bagaimana cara untuk secara efektif terlibat dalam pelaksanaan TPB?⁹
 - Apakah setiap alat kelengkapan parlemen telah mendiskusikan mengenai TPB di bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya?¹⁰

⁹ Pertimbangan mengenai apakah dan bagaimana alat-alat kelengkapan parlemen dapat mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan berkelanjutan nasional dan rencana-rencana sektoral terkait harus termasuk di dalamnya

¹⁰ Sebagai contoh, banyak parlemen memiliki alat kelengkapan di bidang kesejahteraan sosial yang dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan TPB yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan; atau

- Apakah masing-masing alat kelengkapan telah mengidentifikasi Tujuan dan target mana yang harus mereka kerjakan dan bagaimana caranya? Apabila iya, apa yang perlu dilakukan untuk memberdayakan alat-alat kelengkapan tersebut untuk mengambil peran pengawasan TPB?
- Apakah berbagai alat kelengkapan di kedua kamar parlemen telah mendiskusikan apakah dan bagaimana mereka dapat bekerja bersama-sama untuk pengawasan TPB?
- Apakah alat-alat kelengkapan memiliki rencana kerja yang merefleksikan kegiatan-kegiatan TPB?
- Seberapa efektif alat-alat kelengkapan parlemen dalam bekerja dengan pemerintah untuk pelaksanaan TPB?
 - Apakah alat-alat kelengkapan parlemen meminta kepada kementerian-kementerian terkait untuk menghadiri dengar pendapat dengan komisi dan memberitahukan perkembangan mengenai kemajuan strategi atau rencana nasional TPB?
 - Apakah alat-alat kelengkapan parlemen bisa menginisiasi hak angket mengenai bagaimana Tujuan-tujuan telah secara berhasil dicapai?
- Seberapa efektif alat-alat kelengkapan parlemen bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan internasional dan pemangku kepentingan kunci lainnya dalam mendukung pelaksanaan TPB?
 - Apakah alat kelengkapan parlemen mengundang kelompok-kelompok ini untuk berpartisipasi dalam rapat dengar pendapat umum dan/atau untuk memberikan informasi mengenai keterlibatan mereka dalam pelaksanaan TPB?
 - Apakah alat-alat kelengkapan parlemen dan/atau stafnya menggunakan kelompok ini untuk memberikan informasi dan/atau masukan teknis kepada alat kelengkapan mengenai isu TPB?

alat kelengkapan di bidang hukum dan peradilan yang mungkin dapat digunakan untuk memantau kemajuan TPB ke-16 mengenai kelembagaan inklusif, perdamaian dan akses keadilan.

- Se jauh mana TPB telah berhasil diurusutamakan di parlemen? Penyesuaian-penyesuaian seperti apa yang diperlukan dalam struktur dan metode kerja parlemen, apabila ada, untuk memungkinkan parlemen bekerja secara lebih efektif mengenai TPB?
- Apakah sekretariat parlemen memiliki staf dan sumber daya yang memadai untuk memberikan layanan dukungan kepada anggota parlemen dan alat-alat kelengkapan terkait dengan kegiatan-kegiatan TPB mereka?

Pertanyaan 4: Membuat undang-undang untuk mendukung TPB

Parlemen akan memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan TPB dengan membangun kerangka hukum yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Hal ini berarti memberlakukan legislasi yang berpihak pada kaum miskin, sensitif gender, dan berdasarkan hak asasi manusia. Penting bahwa parlemen mengkaji semua usulan legislasi melalui lensa yang berbasis hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian parlemen akan mampu untuk mengidentifikasi mengenai apakah dan bagaimana sebuah undang-undang memajukan, atau dapat diubah untuk memajukan, pelaksanaan TPB yang lebih efektif. Dalam melakukan hal ini parlemen harus proaktif dalam memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Masukan publik harus meliputi pelaksanaan rapat dengar pendapat umum mengenai rancangan undang-undang dan mengundang masyarakat sipil dan anggota masyarakat untuk memberikan masukan.

Bagian A: mengidentifikasi dasar perbandingan (*baseline*) Anda

- Apakah telah dilakukan kajian untuk mengidentifikasi perubahan perundangan yang diperlukan untuk mendukung TPB?
 - Apakah rancangan undang-undang disertai dengan penilaian dampak rancangan undang-undang tersebut pada pelaksanaan TPB?
 - Apakah undang-undang diusulkan dengan nota penjelasan yang menjabarkan dampak dari rancangan undang-undang tersebut terhadap TPB terkait? Apakah pidato menteri yang mengusulkan undang-undang biasanya menjelaskan apakah dan bagaimana undang-undang yang diusulkan dapat memajukan TPB?

Dalam 12 bulan terakhir:

- Berapa banyak undang-undang yang berisikan rujukan khusus terhadap TPB?
- Berapa banyak usulan amandemen yang berisikan rujukan khusus terhadap TPB? Berapa banyak dari amandemen tersebut yang telah diadopsi?

Bagian B: merefleksikan dampak dari upaya-upaya Anda

- Seberapa efektifkah alat kelengkapan dalam mengkaji rancangan undang-undang melalui proses partisipatif dan terbuka untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang tersebut mendukung pelaksanaan TPB?
 - Apakah alat kelengkapan melibatkan masyarakat untuk memastikan umpan balik mereka mengenai persoalan pelaksanaan TPB di kehidupan nyata?
 - Apakah alat kelengkapan parlemen mengundang masukan dari pakar-pakar eksternal mengenai pelaksanaan TPB (termasuk apa yang berhasil dan tidak berhasil)?

- Se jauh mana alat kelengkapan melakukan “penilaian dampak”¹¹ rancangan undang-undang dari sudut pandang TPB?
 - Apakah terdapat proses untuk melaksanakan penilaian dampak gender dari undang-undang yang diusulkan?
 - Apakah terdapat proses untuk menilai dampak hak asasi manusia dari usulan undang-undang dan memastikan kesesuaian rancangan undang-undang tersebut dengan konvensi-konvensi hak asasi manusia yang telah diratifikasi dan rekomendasi-rekomendasi terkait yang dikeluarkan oleh mekanisme hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa?
- Seberapa efektifkah dukungan yang diberikan kepada parlemen?
 - Apakah tingkat ketersediaan staf pada saat ini dapat menyediakan kepada anggota parlemen dan alat kelengkapan, penelitian legislatif, analisis dampak TPB dan dukungan-dukungan lainnya yang mereka perlukan?
 - Perangkat atau informasi apa yang diperlukan oleh parlemen untuk bisa mempertimbangkan TPB secara lebih efektif pada saat membuat undang-undang?

11 Perangkat penilaian dampak sosio ekonomi dirancang untuk memungkinkan parlemen untuk menilai dampak sosial, budaya, gender, lingkungan, asasi manusia, kemiskinan dan ekonomi dari sebuah rancangan undang-undang. Proses ini biasanya dilakukan oleh staf sekretariat parlemen, yang kemudian menyampaikannya kepada anggota parlemen sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan.

Pertanyaan 5: Pendanaan TPB

Parlemen mengadopsi anggaran nasional dan mengawasi belanja untuk memastikan uang rakyat telah digunakan dengan tepat dan efektif. Dalam peran ini, parlemen dapat menggunakan kewenangan pembuatan undang-undang dan pengawasan mereka untuk memastikan pemerintah berfokus pada pembuatan anggaran yang pro-kaum miskin, sensitif gender, berdasarkan hak asasi manusia, yang mendukung pelaksanaan TPB.

Bagian A: mengidentifikasi dasar perbandingan (*baseline*) Anda

- Apakah usulan APBN yang terbaru memberikan penjelasan mengenai bagaimana anggaran tersebut, juga mempertimbangkan TPB? Apakah parlemen meminta pemerintah untuk melakukan hal ini?
- Apakah APBN mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan TPB? Apabila ya, berapa persen dari anggaran yang dialokasikan, dan untuk tujuan apa?
- Apakah negara Anda menerima atau memberikan pendanaan pembangunan internasional untuk mendukung TPB?
- Apakah kerangka acuan kerja dari komisi keuangan dan badan anggaran mensyaratkan mereka untuk mempertimbangkan pelaksanaan TPB sebagai bagian dari kegiatan pengawasan mereka?
- Apakah terdapat BAKN atau alat kelengkapan lain di sekretariat parlemen dengan kapasitas untuk memberikan dukungan kepada alat kelengkapan parlemen dalam melakukan kajian terhadap usulan anggaran dan realisasi anggaran terkait dengan TPB?

Dalam 12 bulan terakhir:

- Berapa banyak laporan mengenai TPB yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga sejenis lainnya disampaikan kepada parlemen?
- Berapa banyak laporan dari alat kelengkapan terkait yang berisikan rujukan khusus mengenai alokasi anggaran atau realisasi belanja yang terkait dengan TPB?

Bagian B: merefleksikan dampak dari upaya-upaya Anda

- Seberapa jauh parlemen mempertimbangkan TPB pada saat mendiskusikan dan mengadopsi anggaran?
 - Apakah parlemen memiliki kewenangan efektif untuk merekomendasikan perubahan kepada pemerintah atau secara langsung mengubah anggaran sejalan dengan kesimpulan yang didapatnya?
- Seberapa efektif parlemen dapat melakukan pengawasan terhadap anggaran belanja dan menilai bagaimana APBN berkontribusi untuk memajukan pelaksanaan TPB?
 - Apabila anggaran tidak memberikan dukungan yang cukup kepada TPB, apakah parlemen atau alat kelengkapan terkait memiliki kewenangan untuk bertindak atau meminta pemerintah untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi ini?
- Seberapa efektifkah parlemen terlibat dalam mengawasi pendanaan pembangunan internasional yang mendukung TPB?
 - Apakah bantuan asing baik dari sumber publik dan privat (LSM, yayasan, dll.) dipertanggungjawabkan dalam APBN? Bagaimana pengawasan terhadap pendanaan ini dilakukan?
 - Apakah terdapat rencana kerjasama pembangunan nasional (biasa juga disebut sebagai “kebijakan bantuan”)? Apakah pemerintah melapor kepada parlemen mengenai pelaksanaan rencana kerjasama pembangunan ini?
 - Apakah pinjaman internasional atau perjanjian dengan mitra pembangunan internasional memerlukan persetujuan oleh parlemen atau perlu didiskusikan di DPR?
- Apakah BAKN atau sekretariat parlemen memiliki kapasitas untuk melakukan audit gender terhadap anggaran atau analisis anggaran dari sudut pandang hak asasi manusia?
 - Apabila tidak, dukungan tambahan apa yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan audit atau analisis tersebut?
 - Apakah terdapat organisasi masyarakat sipil yang dapat bermitra dengan parlemen untuk melakukan audit atau analisis ini?

Pertanyaan 6: Memantau pelaksanaan TPB

TPB perlu untuk secara seksama dipantau baik secara nasional dan global. Laporan secara berkala akan disampaikan di tingkat global untuk melacak kemajuan di berbagai negara. Secara nasional, pemantauan akan dikaitkan dengan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program nasional yang sejalan dengan kerangka kerja TPB. Penggunaan pendekatan berbasis hak di TPB mengakibatkan lebih banyak penekanan pada kualitas hasil dan persoalan pemerataan. Memantau tantangan-tantangan yang terkait dengan langkah-langkah baru tersebut oleh karenanya harus dijadikan sebagai prioritas. Pengumpulan dan analisis data menjadi sangat penting. Diperlukan kapasitas nasional yang kuat untuk pengumpulan dan pengolahan data, termasuk berdasarkan gender, usia, kelompok minoritas dan status kesehatan.

Bagian A: mengidentifikasi dasar perbandingan (*baseline*) Anda

- Apakah negara Anda telah membuat laporan nasional mengenai kemajuannya dalam pelaksanaan TPB?
- Apakah negara Anda telah mengambil bagian dalam mekanisme review High-Level Political Forum (HLPF) dan mendapatkan rekomendasi internasional mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan TPB?

Dalam 12 bulan terakhir:

- Berapa banyak rapat dengar pendapat alat kelengkapan yang secara khusus membahas TPB?
- Berapa banyak pertanyaan parlemen yang mencakup rujukan khusus kepada TPB?
- Berapa banyak hak angket yang telah dijalankan terkait dengan TPB?

Bagian B: merefleksikan dampak dari upaya-upaya Anda

- Sejauh mana parlemen mengkaji, membahas dan mengambil tindakan terkait dengan laporan kemajuan dan dokumen-dokumen

terkait lainnya yang dibuat oleh pemerintah mengenai pelaksanaan TPB dan/atau rencana pembangunan berkelanjutan nasional?

- Apakah parlemen berpartisipasi dalam pembuatan laporan kemajuan tersebut?
 - Apakah laporan-laporan tersebut dirujuk ke alat kelengkapan parlemen untuk diskusi lebih lanjut?
 - Bagaimana rekomendasi parlemen mengenai pembangunan berkelanjutan dan/atau persoalan terkait TPB dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah?
- Sejauh mana parlemen mampu untuk memastikan rekomendasi mengenai pelaksanaan TPB dari badan internasional, sebagai contoh High Level Political Forum ditindaklanjuti?
 - Apakah kewenangan untuk memulai hak angket digunakan untuk mempelajari persoalan terkait dengan pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan terkait TPB oleh pemerintah?
 - Apakah hak angket parlemen secara terbuka melibatkan publik dan pakar eksternal guna mendapatkan masukan mereka terkait dengan persoalan pelaksanaan TPB dalam kehidupan nyata?
 - Apakah terdapat laporan resmi yang dihasilkan pada saat angket tersebut selesai? Apakah laporan tersebut dipublikasikan (contoh: di perpustakaan parlemen atau di website parlemen)?
 - Seberapa efektifkah parlemen dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dan/atau *focal point* SDG untuk mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi hak angket tersebut?
- **Seberapa efektifkah parlemen dalam memantau kebijakan pembangunan pemerintah, baik sebagai “donor” ataupun “penerima” dari bantuan pembangunan luar negeri?**
 - Apakah laporan tahunan mengenai pencairan atau penerimaan bantuan pembangunan asing disampaikan kepada parlemen untuk dibahas pada sidang paripurna atau rapat komisi?

- **Seberapa efektifkah pemantauan parlemen terhadap interaksi pemerintah dengan mitra-mitra pembangunan internasional (contoh: donor bilateral, badan-badan regional dan organisasi-organisasi multilateral)?**
 - Apakah pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada parlemen mengenai program, proyek, dan kegiatan yang didukung oleh mitra pembangunan internasional?
 - Apakah mitra pembangunan internasional diundang untuk menyampaikan informasi kepada parlemen dan alat kelengkapan terkait mengenai persoalan terkait TPB?

Pertanyaan 7: Partisipasi masyarakat

Menjadikan SDG agar berpusat pada rakyat berarti rakyat dari seluruh lapisan masyarakat harus dapat memberikan pendapatnya dalam proses hukum dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini juga berarti mereka harus bisa menuntut tindakan korektif dari pembuat kebijakan, baik di pemerintah maupun parlemen. Pertumbuhan teknologi informasi yang berlangsung cepat membawa cara-cara baru bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan. Pada saat yang bersamaan, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk penguatan metode-metode konvensional untuk meneruskan aspirasi masyarakat ke dalam proses-proses di parlemen. Penting bagi parlemen untuk secara proaktif melibatkan masyarakat baik dalam mengetahui prioritas SDG masyarakat maupun menilai pelaksanaan SDG di lapangan.

Bagian A: mengidentifikasi dasar perbandingan (*baseline*) Anda

- Apakah terdapat kampanye publik nasional mengenai TPB? Apakah parlemen mengambil bagian dalam kampanye ini?
- Apakah parlemen menyelenggarakan konsultasi publik secara berkala mengenai TPB? Apakah parlemen memiliki platform online dengan akses terbuka untuk berkomunikasi dengan masyarakat mengenai TPB?

Dalam 12 bulan terakhir:

- Berapa banyak acara publik mengenai TPB yang telah diselenggarakan di parlemen atau oleh parlemen?
- Berapa banyak kunjungan penjangkauan atau kunjungan dail yang difokuskan pada isu TPB?

Bagian B: merefleksikan dampak dari upaya-upaya Anda

- Seberapa efektifkah kerja parlemen dalam berkomunikasi dengan publik tentang kerja-kerjanya dalam mendukung pelaksanaan TPB?
 - Apakah parlemen memiliki strategi komunikasi yang meliputi upaya-upaya untuk menjangkau publik mengenai isu-isu TPB?
 - Apakah website parlemen dirancang untuk mengetahui dengan mudah kegiatan anggota parlemen yang terkait dengan TPB?
 - Apakah parlemen menggunakan media sosial untuk menyosialisasikan pekerjaannya yang terkait dengan TPB?
- Sejauh mana parlemen bertemu dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk berdiskusi tentang TPB atau isu-isu pembangunan?
 - Apabila anggota parlemen ingin bertemu dengan masyarakat untuk membahas isu TPB, dukungan apa yang harus diberikan oleh sekretariat untuk mewujudkan hal ini?
 - Apakah pendekatan tersebut dapat dibuat secara sistematis di seluruh alat kelengkapan parlemen? Jika ya, bagaimana caranya?
 - Apakah ada Langkah khusus untuk menjangkau generasi muda?
- Sejauh mana alat kelengkapan parlemen melakukan kunjungan lapangan untuk mengawasi pelaksanaan TPB dan dampak dari program-program terkait TPB terhadap daerah dan masyarakat?
 - Apakah alat kelengkapan parlemen memiliki kewenangan dan/atau sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kunjungan lapangan dimaksud?

- Apabila alat kelengkapan parlemen mengadakan kunjungan lapangan, apakah ada upaya untuk bertemu dengan kelompok marginal atau rentan (contoh: perempuan, kaum muda atau kaum miskin)?

Pertanyaan 8: Memastikan bahwa dampak TPB dirasakan oleh kelompok paling rentan

Agenda 2030 secara spesifik menyatakan bahwa “tidak ada yang akan ditinggalkan”. Tujuan 5 secara eksplisit menargetkan isu ketidaksetaraan gender dan Tujuan 10 meminta pemerintah-pemerintah untuk menurunkan tingkat kesenjangan secara lebih luas. Agenda 2030 secara jelas menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara harus secara langsung mengatasi ketidakadilan gender dan melakukan segala upaya untuk melibatkan kelompok marginal dan rentan. Hal ini memerlukan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan wilayah (contoh: Sebagian masyarakat pedesaan mungkin memiliki akses kurang terhadap pelayanan), demografi (contoh: mungkin perlu ada upaya khusus untuk mendukung akses kelompok muda ke dalam sistem peradilan) atau indikator penduduk lainnya. Parlemen dapat secara aktif menggunakan kewenangannya untuk memastikan bahwa kebutuhan kelompok-kelompok rentan dipertimbangkan.

Bagian A: mengidentifikasi dasar perbandingan (*baseline*) Anda

- Apakah kelompok-kelompok marginal dan rentan secara jelas telah diidentifikasi oleh negara Anda?
 - Apabila ya, berapa banyak kelompok marginal/rentan yang ada? Berapa persentase mereka dari jumlah penduduk secara keseluruhan? Kriteria apa yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok ini?
- Apakah target dan indikator nasional mempertimbangkan kelompok-kelompok yang kurang diwakili, marginal, dan rentan?
 - Apakah data terdapat mengenai dampak TPB terhadap kelompok-kelompok ini tersedia untuk parlemen?
- Bagaimana kelompok-kelompok ini diwakili di parlemen? (contoh: perempuan, kaum muda, masyarakat adat, penyandang disabilitas, etnik minoritas dan minoritas budaya)?

- Apakah terdapat analisis mengenai kebutuhan hukum, kebijakan atau program khusus dari kelompok marginal dan rentan ini yang dilakukan pada saat mengidentifikasi prioritas pelaksanaan TPB nasional?
- Apakah parlemen membuat upaya khusus untuk melibatkan kelompok-kelompok yang kurang terwakili dan marginal ini dalam berkonsultasi mengenai isu-isu terkait TPB (contoh: melalui alat kelengkapan parlemen atau pada saat kunjungan lapangan)?

Dalam 12 bulan terakhir:

- Berapa banyak rapat parlemen yang difokuskan untuk membahas hak dan kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan dan marginal?
- Berapa banyak rapat dengar pendapat yang dilaksanakan dengan kehadiran perwakilan kelompok rentan atau marginal?

Bagian B: merefleksikan dampak dari upaya-upaya Anda

- Langkah-langkah apa yang telah diambil oleh parlemen untuk memastikan bahwa “tidak ada yang ditinggalkan” dalam pelaksanaan TPB?
 - Sejauh mana anggota parlemen memiliki akses terhadap informasi mengenai kondisi ekonomi dan sosial kelompok-kelompok rentan dibandingkan dengan penduduk umum lainnya; keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan utama dari kelompok rentan di negara Anda; dan tantangan-tantangan utama yang menghambat pemenuhan hak-hak kelompok rentan secara menyeluruh (contoh: politik, ekonomi, budaya)?
 - Sejauh mana anggota parlemen menggunakan informasi ini pada saat membuat undang-undang anggaran dan mengkaji pelaksanaan TPB?
- Strategi apa, jika ada, yang telah diambil oleh parlemen untuk meningkatkan keberagaman di parlemen? Mekanisme parlemen apa yang telah berhasil dalam memajukan keberagaman dan mengapa? Faktor-faktor apa yang dapat mendorong orang dari berbagai latar belakang yang beragam untuk bekerja di parlemen, atau membuat mereka tidak melakukan hal tersebut?

- Apakah parlemen memantau keterwakilan dari kelompok yang kurang terwakili dan kelompok marginal dalam komposisi anggota, termasuk jumlah orang dari kelompok-kelompok tersebut yang yang mendapatkan jabatan di parlemen atau memegang posisi pengambil keputusan?
- Pendekatan-pendekatan apa yang dapat diterapkan untuk menyalurkan suara dan aspirasi kelompok-kelompok yang kurang terwakili atau marginal ke dalam proses-proses parlemen terkait dengan isu TPB (contoh: menunjuk orang yang bukan anggota parlemen untuk bergabung ke dalam alat kelengkapan parlemen, dan merekrut anggota dari kelompok marginal sebagai penasihat/staf ahli alat kelengkapan)?